
Proses Pembentukan Kebijakan Pendidikan: Analisis Deskriptif Tahapan Dan Dinamika Politik

Sherly Nurhidayah¹⁾, Angga Denuyasa²⁾, Dina Novita³⁾, Abdul Kodir⁴⁾, Afriantoni⁵⁾

^{1,2,3,4)} Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Sherly Nurhidayah

Email: selyxx300@gmail.com
danuuangga@gmail.com
novitadina830@gmail.com
abdulkodir190106@gmail.com
afriantoni_uin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan kebijakan pendidikan dengan menitikberatkan pada tahapan kebijakan serta dinamika politik yang mempengaruhinya. Kebijakan pendidikan merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan sumber daya manusia, sehingga proses pembentukannya perlu dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan pendidikan terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki karakteristik tersendiri serta melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan secara linear, melainkan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks. Dinamika politik memiliki pengaruh signifikan dalam setiap tahapan kebijakan, terutama dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan. Kepentingan aktor, distribusi kekuasaan, serta proses negosiasi menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan. Kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Selain itu, tekanan dari kelompok kepentingan serta kondisi sosial-ekonomi juga turut mempengaruhi substansi kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan dapat mengurangi efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, proses kebijakan, dinamika politik, analisis deskriptif.

Abstract

This study aims to analyze the process of educational policy formulation by focusing on policy stages and the political dynamics that influence them. Educational policy is an important instrument in determining the direction of human resource development; therefore, its formulation process needs to be examined comprehensively. The method used in this study is a qualitative descriptive approach through a literature review based on books, scientific journals, and relevant policy documents. The findings show that the process of educational policy formulation consists of several main stages, namely problem identification, policy formulation, decision-making, implementation, and evaluation. Each stage has its own characteristics and involves various actors with different interests. In practice, this process does not always run linearly, but is often influenced by complex political dynamics. Political dynamics have a significant impact at every stage of the policy process, especially in the formulation and decision-making stages. The interests of actors, the distribution of power, and negotiation processes are key factors in determining policy direction. Educational policy is not entirely neutral, but rather a result of compromises among various interacting interests. In addition, pressure from interest groups as well as socio-economic conditions also influence the substance of the policies produced. This study also finds that the lack of transparency and public participation in the policy-making process can reduce the effectiveness of the resulting policies. Therefore, efforts are needed to increase community involvement and strengthen accountability at every stage of the policy process. Thus, the resulting educational policies are expected to be more responsive to societal needs and capable of improving the quality of education sustainably.

Keywords: *Educational Policy, Policy Process, Political Dynamics, Descriptive Analysis.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah dapat mengarahkan tujuan, strategi, serta program pendidikan yang akan dilaksanakan (Alfirzan et al., 2020). Oleh karena itu, kualitas kebijakan pendidikan sangat menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam praktiknya, pembentukan kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga sarat dengan dimensi politik. Kebijakan pendidikan sering kali menjadi arena interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan utama memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan, namun tidak dapat mengabaikan peran aktor lain seperti legislatif, masyarakat, dan kelompok kepentingan (Dwi et al., 2024).

Proses pembentukan kebijakan pendidikan pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan (Amri et al., 2021). Namun, dalam realitasnya, proses tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Sering kali terjadi intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Salah satu permasalahan utama dalam pembentukan kebijakan pendidikan adalah kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Kebijakan sering kali dirumuskan secara *top-down* tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang efektif dalam menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Selain itu, adanya dominasi kekuasaan oleh aktor tertentu dapat menyebabkan terjadinya bias dalam kebijakan.

Dinamika politik dalam pembentukan kebijakan pendidikan menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan proses interaksi dan negosiasi antara berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan kompromi antar aktor (Sui-Ni, 2023).

Selain faktor politik, pembentukan kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan sosial yang cepat menuntut adanya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pendidikan. Faktor budaya juga berperan dalam menentukan nilai dan norma yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.

Dalam era globalisasi, kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh tren internasional. Adanya standar pendidikan global serta persaingan antar negara mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih kompetitif (Ruyadi & Dahliyana, 2022). Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam menyesuaikan kebijakan global dengan konteks lokal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan kebijakan pendidikan serta dinamika politik yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas kebijakan pendidikan serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena

proses pembentukan kebijakan pendidikan, khususnya terkait tahapan kebijakan dan dinamika politik yang menyertainya (Fadli, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, interpretasi, serta hubungan antar konsep yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap proses kebijakan pendidikan.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai proses pembentukan kebijakan Pendidikan (Nazir, 2019). Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan kebijakan serta dinamika politik yang terjadi di dalamnya. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel, melainkan hanya mendeskripsikan kondisi yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan untuk digunakan dalam kajian kebijakan publik yang bersifat kompleks dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian konseptual dan teoritis mengenai kebijakan pendidikan (Sugiyono, 2020). Literatur yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini dapat memperoleh perspektif yang luas serta mendalam mengenai proses pembentukan kebijakan pendidikan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan dinamika politik (Moleong, 2021). Dokumen yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah lainnya. Studi dokumentasi dipilih karena mampu memberikan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain, seperti wawancara atau observasi.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan isi dari berbagai dokumen atau teks (Krippendorff, 2019). Dalam penelitian ini, analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan tahapan kebijakan pendidikan serta dinamika politik yang mempengaruhinya. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2020).

Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung analisis akan dieliminasi untuk menjaga keakuratan hasil penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan terstruktur. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar konsep serta menemukan pola-pola yang muncul dalam data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan ditarik berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses analisis serta dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Dalam tahap ini, peneliti berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses pembentukan kebijakan pendidikan serta dinamika politik yang mempengaruhinya.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur yang berbeda. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Selain itu, penggunaan berbagai sumber juga membantu dalam memperkaya perspektif analisis sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai proses pembentukan kebijakan pendidikan. Metodologi ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika politik yang terjadi dalam setiap tahapan kebijakan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian kebijakan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pembentukan Kebijakan Pendidikan

Proses pembentukan kebijakan pendidikan merupakan rangkaian tahapan yang sistematis, namun dalam praktiknya bersifat dinamis dan tidak selalu berjalan secara linear. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu proses mengenali berbagai persoalan pendidikan yang membutuhkan intervensi kebijakan. Masalah tersebut dapat berupa rendahnya kualitas pendidikan, ketimpangan akses, maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Namun demikian, tidak semua masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan karena adanya proses seleksi yang dipengaruhi oleh prioritas pemerintah serta kepentingan politik yang berkembang (Harahap, 2021).

Tahap selanjutnya adalah perumusan kebijakan, yaitu proses penyusunan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, peran para ahli, akademisi, dan birokrat sangat penting dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan analisis. Meskipun demikian, proses ini tidak sepenuhnya bersifat objektif karena sering kali dipengaruhi oleh kepentingan aktor yang terlibat dalam proses kebijakan (Yunitasari et al., 2023).

Tahap pengambilan keputusan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah memilih satu alternatif kebijakan yang dianggap paling tepat untuk diimplementasikan. Keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, seperti tekanan dari kelompok kepentingan serta pertimbangan kekuasaan.

Tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan di lapangan. Implementasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tenaga pendidik. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta komitmen para pelaksana kebijakan (Azza et al., 2021).

Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan, yang bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan serta untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Evaluasi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Aktor Dalam Pembentukan Kebijakan Pendidikan

Pembentukan kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran, fungsi, serta kepentingan yang berbeda-beda. Keberagaman aktor ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak disusun secara tunggal oleh satu pihak saja, melainkan merupakan hasil interaksi dan kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat. Aktor utama dalam proses ini adalah pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang memiliki kewenangan formal dalam merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan utama karena memiliki legitimasi politik dan kekuasaan administratif dalam menentukan arah kebijakan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, dominasi pemerintah dalam proses kebijakan tidak dapat dihindari, terutama dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya pendidikan.

Di samping pemerintah, lembaga legislatif juga memiliki posisi strategis dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Peran legislatif tidak hanya terbatas pada proses pengesahan kebijakan, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui fungsi kontrol tersebut, legislatif dapat memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan serta tidak menyimpang dari kepentingan publik. Selain itu, legislatif juga berperan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Agustino, 2020).

Aktor lain yang memiliki peran penting adalah tenaga pendidik, seperti guru dan kepala sekolah. Mereka merupakan pihak yang secara langsung melaksanakan kebijakan pendidikan di lapangan, sehingga memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi riil sistem pendidikan. Pengalaman praktis yang dimiliki oleh tenaga pendidik menjadi sumber informasi yang sangat berharga dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam proses kebijakan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti forum diskusi publik, konsultasi kebijakan, maupun melalui organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan mencerminkan prinsip demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses informasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah (Hidayat, 2022).

Lebih lanjut, terdapat pula aktor lain seperti organisasi non-pemerintah (LSM), media massa, dan kelompok kepentingan yang turut mempengaruhi proses kebijakan pendidikan. Aktor-aktor ini umumnya berperan dalam memberikan tekanan, advokasi, serta membentuk opini publik terhadap suatu kebijakan. Media, misalnya, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat sekaligus menjadi sarana kontrol sosial terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sementara itu, kelompok kepentingan dapat melakukan lobi dan negosiasi untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses kebijakan. Interaksi antar aktor tersebut menciptakan dinamika yang kompleks, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan sering kali saling bertentangan (Heriyadi et al., 2024).

Dengan demikian, pembentukan kebijakan pendidikan merupakan proses yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam. Kompleksitas ini menuntut adanya mekanisme koordinasi, transparansi, dan partisipasi yang baik agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan bersama serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara efektif.

Dinamika Politik dalam Kebijakan Pendidikan

Dinamika politik merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan kebijakan pendidikan. Politik dalam kebijakan publik mencerminkan adanya interaksi yang kompleks antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan, nilai, serta tujuan yang berbeda. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai produk administratif, melainkan sebagai hasil dari proses sosial-politik yang melibatkan pertarungan kepentingan antar aktor. Pemerintah, legislatif, birokrasi, kelompok kepentingan, hingga masyarakat sipil memiliki peran masing-masing dalam mempengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan.

Salah satu bentuk nyata dari dinamika politik adalah adanya kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan. Aktor politik, seperti pejabat pemerintah maupun anggota legislatif, sering kali mempertimbangkan kepentingan kelompok, partai, atau agenda politik tertentu dalam menentukan kebijakan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kebutuhan objektif masyarakat, melainkan lebih

mencerminkan hasil kompromi kepentingan yang ada. Dengan demikian, kebijakan pendidikan sering kali tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan muatan politik yang mempengaruhi arah dan substansinya (Yunitasari et al., 2023).

Selain itu, proses negosiasi dan kompromi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Setiap aktor yang terlibat membawa kepentingannya masing-masing, sehingga diperlukan proses dialog dan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini pada satu sisi dapat meningkatkan inklusivitas kebijakan karena melibatkan berbagai perspektif, namun di sisi lain juga berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan apabila terlalu banyak kompromi dilakukan. Kebijakan yang terlalu kompromistis sering kali menjadi kurang tegas dan sulit diimplementasikan secara optimal (Agustino, 2020).

Dinamika politik juga dipengaruhi oleh keberadaan kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses kebijakan. Kelompok kepentingan dapat berupa organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan terhadap sektor pendidikan. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan melalui berbagai cara, seperti lobi politik, kampanye publik, serta advokasi kebijakan. Dalam banyak kasus, kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar, baik finansial maupun jaringan politik, cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan kelompok lain (Azza et al., 2021).

Media massa juga memainkan peran strategis dalam dinamika politik kebijakan pendidikan. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik yang dapat mempengaruhi arah kebijakan. Pemberitaan media dapat meningkatkan perhatian publik terhadap suatu isu pendidikan, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu. Dengan demikian, media memiliki peran sebagai alat kontrol sosial yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan kebijakan (Heriyadi et al., 2024).

Secara keseluruhan, dinamika politik dalam kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa proses kebijakan merupakan arena interaksi yang kompleks antara berbagai aktor dan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang transparan, partisipatif, dan akuntabel agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan

Pembentukan kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu faktor utama adalah faktor sosial, yang mencerminkan kebutuhan, kondisi, serta dinamika masyarakat terhadap pendidikan. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat, seperti perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, serta perubahan pola kehidupan masyarakat, menuntut adanya kebijakan pendidikan yang adaptif dan responsive (Harahap, 2021). Misalnya, perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi dalam sistem pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain faktor sosial, faktor ekonomi juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan yang memerlukan biaya besar, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan atau peningkatan kualitas tenaga pendidik, sering kali menghadapi kendala jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengelola anggaran secara efisien dan efektif agar kebijakan yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan optimal (Alfirzan et al., 2020). Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi akses terhadap pendidikan, sehingga kebijakan perlu mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor budaya. Nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat cenderung sulit diterima dan diimplementasikan secara efektif. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas, kebijakan pendidikan yang terlalu individualistik mungkin tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memahami konteks budaya agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan didukung oleh masyarakat (Kholifah et al., 2022).

Selanjutnya, faktor globalisasi juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kebijakan pendidikan. Globalisasi mendorong adanya standar internasional dalam pendidikan, seperti peningkatan kualitas kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, globalisasi juga meningkatkan persaingan antar negara dalam bidang pendidikan, sehingga pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Namun demikian, penerapan standar global juga harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar tidak mengabaikan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat (Pratama et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun global. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai faktor tersebut secara seimbang dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam merumuskan kebijakan pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan dapat efektif, relevan, dan berkelanjutan.

Dampak Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki dampak yang luas terhadap sistem pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia (Ananda, 2021). Salah satu dampak positif yang dapat dihasilkan dari kebijakan pendidikan adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Kebijakan yang dirancang dengan baik mampu mendorong perbaikan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan menghasilkan lulusan yang lebih kompeten.

Kebijakan pendidikan juga berperan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program-program seperti bantuan pendidikan, pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta kebijakan wajib belajar merupakan contoh upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses pendidikan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Pemerataan akses ini menjadi sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, kebijakan pendidikan yang tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak yang sering muncul adalah ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan ketersediaan sumber daya, seperti tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara merata. Selain itu, ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran juga menjadi permasalahan yang sering terjadi. Kebijakan yang tidak didukung oleh perencanaan yang matang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya tanpa memberikan hasil yang optimal (Atikah et al., 2024).

Dampak negatif lainnya adalah munculnya resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini biasanya terjadi jika kebijakan dirumuskan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menyebabkan kesalahpahaman serta penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan individu

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Sebaliknya, kebijakan yang tidak efektif dapat menghambat perkembangan sumber daya manusia dan berdampak negatif terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada (Ananda, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kualitas perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sementara kebijakan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukan kebijakan agar hasil yang dicapai dapat optimal.

KESIMPULAN

Proses pembentukan kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan melibatkan berbagai tahapan serta aktor dengan kepentingan yang beragam, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi, di mana setiap tahapan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam praktiknya, proses tersebut tidak selalu berjalan secara linear dan rasional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama dinamika politik yang berperan dominan dalam tahap perumusan dan pengambilan keputusan melalui kepentingan aktor, distribusi kekuasaan, serta proses negosiasi dan kompromi. Selain faktor politik, faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga memengaruhi pembentukan kebijakan pendidikan. Faktor sosial berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sehingga menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif, faktor ekonomi berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan, sedangkan faktor budaya berperan dalam menentukan nilai dan norma yang menjadi landasan penyusunan kebijakan agar dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, globalisasi dan perkembangan teknologi turut mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang inovatif dan relevan dengan tuntutan zaman, meskipun kebijakan yang diadopsi dari luar tetap harus disesuaikan dengan konteks lokal. Kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan kebijakan yang kurang tepat dapat menimbulkan ketimpangan akses, ketidakefisienan penggunaan sumber daya, dan rendahnya efektivitas implementasi. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemui adalah kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan karena kebijakan sering dirumuskan secara top-down tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan transparan dengan membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat, tenaga pendidik, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan terus disempurnakan sesuai kebutuhan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Alfirzan, Nasri, Y., & Gistituati, N. (2020). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 281–288. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1131>
- Amri, U., Rifma, & Syahril. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/675>
- Ananda, R. (2021). *Komunikasi kebijakan dan pemahaman publik dalam pendidikan*. Kencana.
- Atikah, C., Handayani, H. T., & Mariyanto. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Pendas: Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 1–10. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.13412>
- Azza, F., Setiawan, F., Saputra, R., & Yuliatin, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2), 362–365. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/3280>
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Harahap, N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Educandum*, 14(1), 62–75.
- Heriyadi, H., Rahmi, I., Sulistiawan, E., Kusmiran, A. H., & Sulistiyana. (2024). Systematic Literature Review: Identifikasi Gap dan Kelemahan Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia Periode 2015--2024. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3).
- Hidayat, R. (2022). *Analisis kebijakan publik dalam pendidikan*. Kencana.
- Kholifah, E. P., Setiawan, F., & Fitri, N. L. (2022). Faktor Budaya dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Al-Muaddib: Jurnal Kependidikan*, 4(2), 1–12.
- Krippendorff, K. (2019). *Analisis Isi*. Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2019). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pratama, D. P., Hadi, S., & Syaifuddin, M. (2024). Dinamika Politik dalam Kebijakan Pendidikan. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(1), 1–12.
- Ruyadi, Y., & Dahliana, A. (2022). Basic Competency of Pancasila Ideological Education for Elementary School in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 41(3), 657–670. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i3.45918>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sui-Ni, N. (2023). Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 15(2), 120–134.
- Yunitasari, D., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar: Definisi, Aktor Pelaksana, Arena, Konteks, Jenis, dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9(3), 1506–1515. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/2886>